



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Lelang Bermasalah, Sistem Jalan Berbayar Terancam Batal

Peserta lelang mundur, pemerintah DKI meminta pendapat hukum kejaksaan.

Linda Hairani

linda.hairani@tempo.co.id

JAKARTA—Rencana penerapan sistem jalan berbayar elektronik alias *electronic road pricing* (ERP) di Ibu Kota terancam batal. Di tengah lelang pengadaan sistem ERP yang berlarut-larut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengisyaratkan bahwa pembatasan kendaraan dengan sistem jalan berbayar itu tidak menjadi prioritas.

Anies mengatakan, kepastian kelanjutan lelang ERP masih menunggu terbitnya pendapat hukum dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. "Lalu, kami akan bahas bersama panitia lelang," kata dia, Jumat lalu.

Pemerintah DKI, menurut Anies, meminta pendapat hukum dari Kejaksaan Tinggi ihwal lelang jalan berbayar itu sejak November tahun lalu. Alasannya, pemerintah DKI tak ingin proyek ERP bermasalah di kemudian hari. Namun Anies tak merinci masalah dalam lelang tersebut. Dia hanya menyebutkan telah terjadi ketidakdisiplinan dalam menjalankan proses tender proyek tersebut. Contohnya, kata Anies, ihwal ketentuan pembatasan komunikasi antar-penyelenggara proyek.

Menurut Anies, ERP bukan satu-satunya solusi atas permasalahan transportasi di Ibu Kota. Penyediaan moda transportasi umum, kata dia, berperan lebih signifikan dalam mengurai masalah kemacetan di Jakarta.

Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta, Abdurahman Suhaimi, mendukung pilihan Anies yang tak lagi memprioritaskan ERP. Sebab, menurut dia, ketimbang memaksa masyarakat membayar ekstra, peningkatan kenyamanan, keamanan, dan ketepatan waktu kendaraan umum bakal mengurangi kemacetan. "Pemerintah itu tugasnya bukan membebani masyarakat. ERP itu membebani," kata dia.

Lelang pengadaan sistem ERP oleh pemerintah DKI memasuki tahap pra-kualifikasi pada November lalu. Alih-alih berlanjut ke tahap penawaran harga, dua peserta utama lelang malah mengundurkan diri. Mereka adalah Q-Free asal Norwegia dan Kapsch TrafficCom asal Swedia. Kini, yang tersisa tinggal PT Bali Towerindo Sentra Tbk.

Dalam pernyataan resminya, Chief Executive Officer Q-Free, Håkon Volldal, mengatakan mundurnya perusahaan itu dari lelang ERP dilakukan lantaran ketidakpastian jadwal lelang. Ketidakjelasan struktur pembiayaan proyek serta potensi keuntungan proyek juga menjadi pertimbangan perusahaan untuk mundur. "Pengunduran diri kami merupakan konsekuensi atas ketidakpastian yang terus berlanjut," kata Volldal.

Bukan kali ini saja lelang ERP bermasalah. Lelang pertama ERP berlangsung pada 2016, pada masa pemerintahan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. Kala itu, Komisi Pengawas Persaingan Usa-

ha mempersoalkan kriteria bahwa teknologi ERP yang akan digunakan harus telah digunakan di ruas jalan, koridor, atau kawasan area perkotaan di dunia. Aturan itu dianggap tidak memberi kesempatan kepada perusahaan yang memiliki teknologi ERP tapi belum pernah digunakan di kota-kota negara lain.

Pelaksana tugas Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko, mengatakan lelang ERP berjalan lambat karena pemerintah DKI Jakarta ingin memastikan penerapan sistem itu berjalan sesuai dengan aturan. Alasannya, ERP baru pertama kali diselenggarakan di Jakarta.

Menurut Sigit, pendapat hukum yang diajukan ke Kejaksaan Tinggi juga berhubungan dengan mundurnya peserta lelang itu. Lelang pembuatan sistem ERP diikuti tiga perusahaan yang masing-masing tergabung dalam konsorsium. Pemerintah DKI meminta penjelasan Kejaksaan tentang aturan kemungkinan mengganti peserta yang mundur dengan perusahaan lain. "Perubahan komposisi konsorsium juga menjadi poin yang dibahas," kata dia.

Pengamat transportasi Yayat Supriyatna menyangkan sikap Anies yang tak lagi memprioritaskan ERP. Menurut dia, ERP akan lebih ampuh membatasi kendaraan pribadi ketimbang aturan "3 in 1" ataupun "ganjil-genap" seperti yang saat ini berlaku. "ERP itu *push and pull factor*. Orang akhirnya mau pindah ke angkutan massal.

Kalau tak dipaksa, kapan masyarakat mau pindah ke transportasi umum?" kata Yayat.

Yayat menilai Kota Jakarta sebenarnya sudah siap menerapkan sistem ERP. Terlebih, mulai tahun ini, jalur protokol sepanjang Jalan Jenderal Sudirman sudah didukung transportasi massal, seperti *mass rapid transit* (MRT) dan Transjakarta. Kondisinya sudah berbeda dengan faktor penyebab gagal penerapan ERP pada 2015. "Saat itu, sistem transportasi tak sebaik saat ini," kata dia. ● LANI DIANA | M.

JULNIS FIRMANSYAH

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Lelang Bermasalah, Sistem Jalan Berbayar Terancam Batal

Ditinggalkan Dua Peserta Lelang

KAPSCH TrafficCom mengikuti jejak pesaingnya, Q-Free, mengundurkan diri dari lelang sistem jalan berbayar elektronik. Chief Representative Indonesia Kapsch TrafficCom, Bruno Serrien, mengatakan perusahaannya sudah mengundurkan diri dari konsorsium lelang sejak beberapa bulan yang lalu.

Serrien enggan menyebutkan waktu pastinya, dengan pertimbangan masih adanya perusahaan lain dalam konsorsium itu. "Saya bisa pastikan kami mengundurkan diri pada

2018," kata dia, Jumat lalu.

Serrien menjelaskan, Kapsch berada dalam satu konsorsium bersama beberapa perusahaan Indonesia. Ia mengatakan anggota konsorsium lain berhak untuk tetap ikut proses lelang meski Kapsch mengundurkan diri. "Mereka bisa lanjut, tapi kami pemilik teknologinya," kata dia.

Serrien mengatakan Kapsch telah beroperasi di Indonesia, bukan baru beberapa tahun belakangan ini. Khusus untuk proyek ERP, menurut dia, Kapsch sudah menanamkan modal dan

peralatan. Sejak awal, kata dia, Kapsch berkomitmen untuk turut berperan dalam kebijakan transportasi di Ibu Kota. "Mundur dari lelang merupakan keputusan yang sulit."

Serrien menambahkan, setiap proses tender yang diikuti Kapsch bersifat unik. Tiap kota memiliki permasalahan transportasi yang berbeda pula. Kapsch juga pernah mundur dari proses lelang di kota di negara lain.

Khusus di Jakarta, Serrien mengatakan, ketidakpastian ihwal jadwal proyek, struktur pembiayaan, dan perhitungan

keuntungan menjadi dasar pertimbangan untuk mundur. "Ini keputusan terbaik, terlalu banyak ketidakpastian," ujar dia. Meski begitu, Serrien berharap Kapsch masih bisa berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan kota di Jakarta.

Pada 2014, Kapsch, perusahaan asal Swedia, pernah menguji coba sistem ERP di Jalan Jenderal Sudirman. Sedangkan Q-Free, perusahaan asal Norwegia, mengetes sistem ERP di Jalan H R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. ● LINDA HAIRANI